DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ardiansyah Putra Hrp, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya, 2020.
- Budi Untung, *Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Debi Eka Putri, dkk, *Lembaga Keuangan Bank & Non-Bank*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.
- Itang, Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2016.
- Jamal Wiwoho & Anis M. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. Semarang: Undip Press, 2017.
- MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *OJK dan Pengawasan Mikro Prudensial*. Jakarta, 2019.
- _____, Perbankan. Jakarta, 2019.
- Reza Nurul Ichsan, dkk, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Robert Guttmann, "The Transformation of Banking", dalam *Shadow Banking Scope, Origins, and Theories*. New York: Routledge, 2018.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Zoltan Pozsar, "Shadow Banking A View from the USA", dalam *Shadow Banking Scope, Origins, and Theories*. New York: Routledge, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Bank Pekreditan Rakyat.

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor: 779/PID.B/2022/PN JKT BRT.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 2113 K/PID.SUS/2023.

D. Internet

- Bisnis Tempo, "Koperasi Bermasalah Terus Bermunculan, Ini Tiga Dampaknya ke Masyarakat", https://bisnis.tempo.co/read/1695080/koperasi-bermasalah-terus-bermunculan-ini-tiga-dampaknya-kemasyarakat?page_num=2, diakses pada 25 Oktober 2023
- CNBC Indonesia, "Ini 8 Kasus Koperasi Bermasalah Yang Gagal Bayar", https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar, diakses pada 25 Oktober 2023.
- Investopedia, "Shadow Banking System: Pengertian, Contoh, dan Cara Kerja", https://www.investopedia.com/terms/s/shadow-banking-system.asp, diakses pada 31 Oktober 2023.
- Katadata, "Timpangnya Jumlah Koperasi di Indonesia, Jawa Mendominasi", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/timpangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawa-mendominasi, diakses pada 25 Oktober 2023.
- Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/

| https://ww | masi Koperasi Sektor R vw.kompas.id/baca/rise at-perekonomian-masy | t/2023/07/11/optim | asi-koperasi-sektor- |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| , "I | Pengamat: Koperasi G | agal Bayar Bermul | a dari Anggota yang |
| Awam | sampai | Investasi | Menggiurkan", |
| https://money.kompas.com/read/2023/02/06/132000626/pengamat | | | |
| 1 0 | agal-bayar-bermula-da page=all, diakses pada | | vam-sampai- |
| | Uang Rampasan KS | P Indosurya Siap | Dibagikan kepada |
| | https://www.k | | |
| | ksp-indosurya-siap-dil | | _ |
| April 2024 | | VA | |

E. Dokumen Lain

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (Draft Oktober 2023).

Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Mandiri oleh Koperasi.